

CIVIL SOCIETY DAN MULTIKULTURALISME DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Usman

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan

Email: usman_aladipni@yahoo.co.id

Abstrak: Indonesia merupakan Negara yang kaya akan ragam suku, etnik, budaya dan agama. Negara yang terkenal akan kemajemukannya, di satu sisi merupakan kekayaan dan kebanggaan. Namun, di sisi lain merupakan Negara yang potensial untuk berkonflik bahkan potensial untuk disintegrasi. Wacana *Civil Society* dan multi-kulturalisme layak dikedepankan untuk meminimalisir konflik dan disintegrasi bangsa Indonesia ini. Ditambah lagi dengan gerakan transnasional yang belakangan melanda Indonesia. Menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan, penghormatan atas keberagaman yang dianut, menghargai satu sama lain merupakan bagian integral dalam wacana *Civil Society* dan multikulturalisme yang harus di berikan sejak dini melalui pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam menyelaraskan ruh Islam melalui pendidikan sehingga terciptanya masyarakat madani.

Kata kunci: *Civil Society*, Multikulturalisme, Pendidikan Islam, HAM

Abstract: Indonesia is a rich country with various tribes, ethnics, cultures, and religions. It has been famous country of its pluralism. In one side, it is a wealth and pride but in another side it is a country with high potency of conflicts for disintegration. A *Civil Society* discourse and multiculturalism is worthy to be taken to minimize conflicts and disintegration in Indonesia. In addition, there are the transnational movements that faced Indonesia. Appreciating human rights, equality, respecting religion believed, appreciating others are integral parts of the *Civil Society* discourse and multiculturalism which should be given early through education. In the Islamic education context, it harmonizes the Islamic senses through education. So that, it creates a society which is called as madani society.

Keywords: *Civil Society*, Multiculturalism, Islamic Education, Human Rights (HAM)

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang tidak saja multi-suku, multi-etnik, multi-agama tetapi juga multi-budaya. Kemajemukan tersebut pada satu sisi merupakan kekuatan sosial dan keragaman yang indah apabila satu sama lain bersinergi dan saling bekerja sama untuk membangun bangsa. Namun, apabila kemajemukan tersebut tidak dikelola dan dibina dengan tepat dan baik akan menjadi pemicu dan penyulut konflik dan kekerasan yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Kemajemukan dalam suatu tatanan sosial membawa semangat kesukuan, etnis, agama, budaya yang beresiko besar akan terjadinya gesekan antara satu dengan yang lain. Perbedaan di antara kelompok-kelompok terkadang menjadi sumbu ketidaksamaan persepsi, hingga menimbulkan konflik. Alienasi dan marginalisasi yang banyak membuat kelompok-kelompok kecil tidak mempunyai kekuatan karena perbedaan mereka, khususnya untuk memisahkan mereka dari kelompok yang dominan.¹

Dalam kondisi seperti ini, pendidikan agama dihadapkan pada kemampuannya untuk menanggulangi perpecahan dan eksistensi agama ditengah arus globalisasi yang sangat deras. Terputusnya jarak geografis, agama, dan budaya dalam berhubungan antara satu sama lain, membentuk suatu tatanan masyarakat sosial dalam keadaan masyarakat yang majemuk. *Civil Society* dan multikulturalisme adalah dua wacana yang akhir-akhir ini mengemuka untuk menjawab tantangan tersebut.

Konsep teoritis masyarakat multikultural and *Civil Society* sebenarnya relatif baru namun, pada prakteknya sudah lama dilaksanakan di Indonesia.² Bahkan dalam Islam konsep ini lebih tua, merujuk pada piagam madinah. Konsep-konsep tersebut mengindikasikan terciptanya suatu keadaan sosial yang agamis, beradab dan kondusif ditengah arus globalisasi dan keanekaragaman budaya. Prinsip mendasar tentang kesetaraan, keadilan, keterbukaan, pengakuan terhadap perbedaan adalah prinsip nilai yang dibutuhkan

¹Donna M. Gollnick and Philip C. Chinn, *Multicultural Education in a Pluralistic Society, Sixth Edition* (New Jersey: Merril Prentice Hall, 2002), hlm. 11.

²Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 99.

manusia di tengah himpitan budaya global. Istilah *Civil Society* dimaknai secara beragam oleh para tokoh menurut geopolitisnya masing-masing.³ Di Indonesia, *Civil Society* diterjemahkan menjadi istilah masyarakat madani, Hal ini berpegang pada konsep piagam Madinah.

Civil Society menaruh perhatian dan berorientasi secara optimal terhadap masalah-masalah demokratisasi, pluralitas dan hak-hak asasi manusia (HAM). Ketiga permasalahan tersebut merupakan masalah yang paling dasar dalam mewujudkan *Civil Society* yang bermartabat dan berkeadilan di masa depan. Perwujudan ketiganya secara optimal dan fungsional dalam kehidupan merupakan tantangan bagi semuanya tanpa kecuali.

Sedangkan wacana multikulturalisme tidak hanya mencakup pada plural-nya agama, tetapi juga mencakup pada ranah keanekaragaman budaya, suku, dan ras.⁴ Paradoks yang terjadi dalam sebuah agama, membawa pemeluknya kedalam suatu tatanan berpikir yang patuh terhadap agama. Disisi lain, kehidupan beragama yang beraneka ragam, menyeret pada kehidupan yang saling bersinggungan dengan pemeluk agama lain. Peningnya kembali kepada agama yang autentik, yakni modus keberagaman yang tidak sekedar setia dengan doktrin skriptual dan statis, tetapi mengarah pada keimanan yang hidup dan menghidupi kemanusiaan secara universal.⁵ Selayaknya agama diperhitungkan untuk mendukung terwujudnya masyarakat multikultural yang mampu mengangkat, menghidupkan dan mengedepankan nilai-nilai ajaran universal, memiliki komitmen kemanusiaan, dan toleransi antar pemeluk agama.

***Civil Society* dan Pendidikan Islam**

Civil Society merupakan sebuah wacana dan konsep yang ditawarkan dalam sebuah kehidupan sosial. Namun, pembahasan

³Abd. Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual: Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah* (Yogyakarta: Gama Media, 2005), hlm. 214.

⁴ Agus Moh. Najib et.al, *Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam (Studi Terhadap UIN Yogyakarta, IAIN Banjarmasin, Dan STAIN Surakarta)* (Surakarta: STAIN Surakarta, 2008), hlm. 6.

⁵ Isrofil Amar, "Studi Normatif Pendidikan Islam Multikultural", *Islamica*, Vol. 4, No.2. (Maret 2010), hlm. 321.

lebih lanjut mengenai wacana *Civil Society* ini akan lebih banyak menggali pada pemakaian konsep *Civil Society* atau masyarakat madani. Istilah masyarakat madani mengandung makna masyarakat yang menjadikan nilai-nilai peradaban sebagai ciri utama. Tanpa bermaksud mengubah substansi dari pendefinisian kedua istilah, secara tersirat, keduanya menunjukkan makna yang sama, meskipun keduanya mempunyai perbedaan pada awal sejarah dan rumpun geopolitis yang berbeda. Di Indonesia, istilah masyarakat madani secara substantial menuju pada perlunya penguatan masyarakat (warga) dalam sebuah komunitas negara untuk mengimbangi dan mampu mengontrol kebijakan negara yang cenderung memposisikan warga negara di posisi yang lebih lemah.⁶

Pengertian Civil Society

Menurut AS. Hikam, ada empat pemikiran mengenai konsep *Civil Society*.⁷ *Pertama*, *Civil Society* dipandang sebagai sistem kenegaraan; *Kedua*, menempatkan *Civil Society* sebagai antitesa dari negara. *Ketiga*, menempatkan *Civil Society* sebagai elemen ideologi dari kelas dominan, dan pemikiran yang keempat, menempatkan *Civil Society* sebagai kekuatan penyeimbang terhadap kekuatan negara. Pendefinisian *Civil Society* sangat bergantung pada kondisi sosio-kultur suatu bangsa, karena konsep tersebut merupakan terma yang terlahir dari sejarah pergulatan bangsa Eropa.⁸

Mengutip pemikiran Zbigniew Rau dengan *background* kajiannya Eropa Timur dan Uni Soviet, menerjemahkan masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang dimana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Sedangkan menurut Kim Sunhyuk mengatakan yang dimaksud masyarakat madani adalah satu satuan yang terdiri dari kelompok-kelompok secara mandiri menghimpun dirinya dan gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara relatif otonom dari

⁶Assegaf, *Studi Islam Kontekstual*, hlm. 242.

⁷Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 144.

⁸Dede Rosyada et.al., *Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 238.

negara.⁹ Sedangkan dalam konteks piagam madinah menyiratkan *pertama*, semua umat adalah *Ummatan Wahidah* meskipun mereka berbeda suku. Kedua, hubungan dengan komunitas muslim dengan non-muslim di dasarkan prinsip-prinsip kesetaraan. Yang dimaksud prinsip-prinsip kesetaraan ini adalah berinteraksi baik dengan tetangga, saling bekerjasama dalam menghadapi musuh yang mengancam Negara, membela mera yang teraniaya dan memnghormati kebebasan beragama yang dianut oleh masing-masing.¹⁰

Konsep *Civil Society* atau masyarakat madani menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Lebih lanjut, konsep ini mengindikasikan adanya sistem sosial yang subur berasaskan prinsip moral dan menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani secara sepintas merupakan format kehidupan alternatif yang mengedepankan semangat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini diberlakukan ketika negara sebagai penguasa dan pemerintah tidak bisa menegakkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia dalam menjalankan pemerintahan. Dari sini, konsep masyarakat madani menjadi alternatif pemecahan, dengan pemberdayaan dan penguatan daya kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada akhirnya terwujud kekuatan sipil yang mampu merealisasikan dan menegakkan konsep hidup yang demokratis dan menghargai hak-hak asasi manusia.

Sejarah Civil Society

Munculnya wacana *Civil Society* bermula dari sejarah pergulatan di Eropa, oleh sebab itu sebagian besar tokoh konsep ini adalah orang-orang Eropa, seperti Cicero, Antonio Gramsci, dan de'Tocqueville. Jika diruntut, awal mula konsep *Civil Society* sebenarnya telah ada sejak masa Aristoteles dengan istilah *koinonia politike*.¹¹ Selanjutnya, pada

⁹Rosyada, *Pendidikan Kewargaan*, hlm. 238-240.

¹⁰Bassam Tibi, *Islam and Cultural accommodation Of social Change* (San Fransisco: Westview Press, 1991), hlm. 17-18.

¹¹*Koinonia politike* adalah sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan.

tahun 1767 Adam Ferguson mengembangkan konsep ini dengan mengambil konteks sosio-kultural dan politik Skotlandia. Hingga perkembangan-perkembangan lanjut yang dilakukan oleh sejumlah tokoh-tokoh Eropa, diantaranya Thomas Paine yang menggunakan istilah *Civil Society* sebagai kelompok masyarakat yang memiliki posisi secara diametral dengan negara, bahkan dianggap sebagai antitesis dari negara.

G.W.F. Hegel (1770-1831) mengatakan bahwa struktur sosial terbagi atas 3 entitas, yakni keluarga, *Civil Society*, dan negara. Keluarga merupakan ruang sosialisasi pribadi sebagai anggota masyarakat yang bercirikan keharmonisan. *Civil Society* merupakan lokasi atau tempat berlangsungnya percaturan berbagai kepentingan pribadi dan golongan terutama kepentingan ekonomi. Sementara negara merupakan representasi ide universal yang bertugas melindungi kepentingan politik warganya dan berhak penuh untuk intervensi terhadap masyarakat.

Dalam konteks Penggunaan kata “madani” sepintas memiliki persamaan dengan kata Madinah dan mengkaitkannya dengan konsep yang berbau Islami. Kata madani mempunyai kaitan erat dengan Madinah secara etimologi dan terminologi. Kota Madinah yang menjadi ibukota negara Muslim pertama itu dikaitkan oleh kalangan pemikir dengan cara mengislamkan kata *Civil Society* dengan memberi atributif keIslaman madani. Konsep *Civil Society* dipandang sebagai konsep ideal yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW.¹²

Konsep *Civil Society* atau masyarakat madani yang pernah dibangun Nabi Muhammad SAW berhasil memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan hukum, jaminan kesejahteraan bagi semua warga, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Dari pemikiran itu, para pemikir Muslim menganggap masyarakat Madinah sebagai prototipe masyarakat ideal dari produk Islam yang memungkinkan untuk disandingkan dengan masyarakat ideal dalam konsep *Civil Society*.

¹²Hujair A.H. Sanaky, “Pembaharuan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani (Tinjauan Filosofis)” dalam *Jurnal Mukaddimah* (Yogyakarta: Kopertais III, 1999), hlm. 4-5.

Pemakaian istilah “masyarakat madani” lebih populer digunakan dalam menerjemahkan istilah *Civil Society* di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam menjelaskan beberapa karakteristik wacana ini, menggunakan karakteristik masyarakat madani. Dalam mewujudkan wacana masyarakat madani, perlu mengetahui prasyarat-prasyarat yang tidak bisa dipisahkan. Karakteristik masyarakat madani adalah:¹³

- a. *Free Public Sphere* adalah adanya ruang publik bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat.
- b. Demokratis adalah entitas yang menjadi penegak wacana masyarakat madani.
- c. Toleran menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati aktivitas yang dilakukan oleh orang lain.
- d. Pluralisme adalah sebuah prasyarat penegakan masyarakat madani, maka pluralisme harus dipahami secara mendalam dengan menciptakan tatanan kehidupan yang menghargai dan menerima kemajemukan dalam konteks kehidupan sehari-hari.
- e. Keadilan sosial dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat.

Dalam penegakan kehidupan masyarakat madani, perlu adanya penegak masyarakat yang bertugas sebagai pengontrol dan pengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang diskriminatif. Prasyarat tersebut menjadi mutlak bagi terwujudnya kekuatan masyarakat madani. Di antara institusi-institusi yang berperan sebagai *social controls* antara lain LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), pers, supremasi hukum, perguruan tinggi, dan partai politik.

Civil Society dan Pendidikan Islam

Tujuan pendidikan nasional dalam jangka waktu yang panjang harus menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai wawasan dan perilaku yang beradab.¹⁴ Oleh sebab itu, konsep *Civil*

¹³Rosyada, *Pendidikan Kewargaan*, hlm. 247-250.

¹⁴Pendidikan merupakan aspek penting dalam upaya menumbuhkan sikap dan perilaku demokratis. Tujuan utama pendidikan sehubungan dengan proses demokrasi

Society diprioritaskan dalam perspektif pendidikan yang juga menjadi tujuan pendidikan nasional. Seluruh elemen atau unsur masyarakat memiliki rasa tanggung jawab kesadaran dan partisipasi yang tinggi untuk merealisasikan hal-hal tersebut dalam realitas kehidupan baik perorangan maupun kolektif, antara lain menciptakan keamanan, kedamaian dan ketertiban bersama di dalam lingkungan sekitar serta upaya-upaya lain yang bersifat strategis, baik jangka pendek maupun untuk jangka panjang bagi terwujudnya kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat dan bangsa, misalnya mengerjakan atau memberikan pendidikan etik, moral dan agama bagi generasi muda bangsa dalam persiapannya menuju masa depan yang kuat dan mandiri.

Konsep dasar pembaharuan pendidikan harus didasarkan pada asumsi-asumsi dasar tentang manusia menurut ajaran Islam, filsafat dan teori pendidikan Islam yang dijabarkan dan dikembangkan berdasarkan asumsi-asumsi tentang manusia dan lingkungannya. Atau dengan kata lain pembaharuan pendidikan Islam adalah filsafat dan teori pendidikan Islam yang sesuai dengan ajaran Islam, dan untuk lingkungan (sosial- kultural) yang dalam hal ini adalah masyarakat madani. Konsep dasar pendidikan Islam supaya relevan dengan kepentingan umat Islam dan relevan dengan disain masyarakat madani. Maka penerapan konsep dasar filsafat dan teori pendidikan harus memperhatikan konteks supra sistem bagi kepentingan komunitas "masyarakat madani" yang dicita-citakan bangsa ini.

Konsep pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia untuk menuju masyarakat madani menjadi penting karena konsep dan praktek pendidikan Islam dirasakan terlalu sempit. Artinya, terlalu menekankan pada kepentingan akhirat, sedangkan ajaran Islam menekankan pada keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat. Maka perlu pemikiran kembali konsep pendidikan Islam yang betul-betul didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia yang akan diproses menuju masyarakat madani, dan yang kedua adalah

adalah menjadikan siswa mampu berpikir secara jelas, terutama mengenai isu-isu sosial dan kewarganegaraan. Lihat Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 144.

lembaga-lembaga pendidikan Islam yang dimiliki sekarang ini, belum atau kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi tantangan dunia modern dan tantangan masyarakat dan bangsa Indonesia disegala bidang. Maka, untuk menghadapi dan menuju masyarakat madani diperlukan konsep pendidikan Islam serta peran sertanya secara mendasar dalam memberdayakan umat Islam.

Suatu usaha pembaharuan pendidikan hanya bisa terarah dengan baik apabila didasarkan pada konsep dasar filsafat dan teori pendidikan yang tepat. Filsafat pendidikan yang mantap hanya dapat dikembangkan di atas dasar asumsi-asumsi dasar yang kokoh dan jelas tentang manusia (hakekat) kejadiannya, potensi-potensi bawaannya, tujuan hidup dan misinya di dunia ini baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, hubungan dengan lingkungan dan alam semesta dan akhirnya hubungan dengan Maha Pencipta. Teori pendidikan yang mantap hanya dapat dikembangkan atas dasar pertemuan antara penerapan atau pendekatan filsafat dan pendekatan empiris. Sehubungan dengan itu, konsep dasar pembaharuan pendidikan Islam adalah perumusan konsep filsafat dan teoritis pendidikan yang didasarkan pada asumsi-asumsi dasar tentang manusia dan hubungannya dengan lingkungan dan menurut ajaran Islam.¹⁵

Hal tersebut di atas, merupakan harapan-harapan yang ingin dicapai dengan pendidikan menghadapi *Civil Society* sebagai sebuah gambaran masyarakat yang memiliki tingkat peradaban dan kemajuan yang amat maju di segala bidang. Pada saat yang demikian itu pula, maka pendidikan Islam berada pada posisi terdepan dan amat strategis, yakni memberikan sumbangsih pendidikan yang bermuatan dan bernuansa etik, moral, mental-spiritualitas keagamaan bagi bangsa.

Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam

Kemajemukan yang dimiliki negara Indonesia mempunyai dampak positif dan negatif. Kemajemukan itu memunculkan khazanah kekayaan dan kekuatan bangsa, akan tetapi juga akan membawa

¹⁵Sanaky, *Pembaharuan Pendidikan Islam*, hlm. 6-7.

persoalan dan problematik.¹⁶ Sejak bangkitnya era reformasi di akhir tahun 90-an hingga peristiwa-peristiwa radikal dan fundamentalisme yang berbau terorisme pada awal tahun 2000,¹⁷ konsep multikultural dalam pendidikan Islam menjadi wacana yang populer. Masdar Hilmy berpendapat bahwa bangsa Indonesia menyadari keragaman budaya yang secara nyata telah ada, namun tidak serta merta diiringi pula dengan anggukan positif. Fakta-fakta yang menunjukkan fenomena keberagaman itu justru memberikan sumbangan terbesar dalam konflik di Indonesia.¹⁸

Pentingnya melakukan pendekatan-pendekatan positif dalam kesadaran kehidupan multikultur yang majemuk agar tidak terjadi konflik horizontal terus-menerus. Kerukunan yang didambakan dalam masyarakat yang multikultur tersebut, tidak bisa secara *taken for granted* atau *trial and error*.

Pengertian Multikulturalisme

Multikulturalisme berasal dari Bahasa Inggris "*multiculturalism*". Multikulturalisme terdiri dari kata "multi" (lebih dari satu), "kultur" (budaya), dan "isme" (aliran/ paham). Secara sederhana, multikulturalisme mengandung pengertian budaya yang beraneka ragam. Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik.¹⁹

Konsep multikulturalisme bisa didefinisikan berbeda, misalnya, konsep multikulturalisme di Amerika yang mengusung keanekaragaman bangsa, karena warga negara Amerika berasal dari berbagai imigran yang datang dari penjuru dunia. Sedangkan, konsep multikulturalisme di Indonesia adalah keanekaragaman budaya, ras,

¹⁶Abd. Rahman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Grafindo, 2011), hlm. 309.

¹⁷Permasalahan tersebut memunculkan wacana baru mengenai pendidikan Islam, yang disinyalir mengalami kesalahan dalam pemahaman dogma agama. Pendidikan Islam di Indonesia perlu sebuah penyesuaian terhadap bentuk-bentuk kebudayaan dan masyarakatnya yang beraneka ragam. Kasus penemuan bom dan buku-buku jihad di beberapa pondok pesantren, menjadi evaluasi mengenai pengajaran dan penanaman dogma-dogma agama.

¹⁸Masdar Hilmy, "Menggagas Paradigma Pendidikan Berbasis Multikultural", *Ullumuna*, Vol. VII No.12 (Juli-Desember 2003), hlm. 332-342.

¹⁹Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, hlm. 75.

dan agama. Namun, multikulturalisme agama di Indonesia menjadi hal sensitif yang harus ditemukan pemecahannya. Oleh karena itu, sebagai sebuah gerakan budaya, multikulturalisme adalah bagian integral dalam berbagai sistem budaya dalam masyarakat yang salah satunya dalam pendidikan, yaitu melalui pendidikan yang berwawasan multikultural.

Multikulturalisme dianggap sebagai sebuah ideologi dan sebuah alat untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam pandangan fungsinya bagi kehidupan manusia. Menurut Assegaf, ada tiga kebijakan strategis dalam rangka membangun demokrasi multikultural. *Pertama*, kebijakan mengenai partisipasi politik di kalangan masyarakat yang beragam budaya. Sebuah sistem politik harus menjamin persamaan politik guna memastikan setiap individu dan kelompok masyarakat dapat menyalurkan aspirasi politik dan berartikulasi dalam memperjuangkan kepentingan mereka. Yang *kedua*, ialah kebijakan mengontrol dan mengatur distribusi sumber daya ekonomi. Kebijakan dasar ini menyangkut hak hidup individu dan kelompok masyarakat, dan yang *ketiga* ialah kebijakan yang paling pribadi, yaitu kebijakan mengenai jaminan memeluk agama.²⁰ Sistem multikultural secara tegas menjamin hak tersebut, sekalipun penganut agama itu merupakan kelompok minoritas di suatu negara. Yang harus di mulai dari Pembelajaran multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas.²¹

Sejarah Multikulturalisme

Konsep multikulturalisme berawal dari perhatian seorang pakar pendidikan Amerika, Prudence Candall yang secara intensif menyebarkan pandangan tentang arti latar belakang peserta didik, baik ditinjau dari aspek budaya, etnis dan agama. Wacana pendidikan multikultural, secara sederhana didefinisikan sebagai pendidikan

²⁰Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam*, hlm. 311-312.

²¹<http://pbidsuccess.blogspot.co.id/2014/02/multikulturalisme-pendidikan-agama.html> (diakses pada tanggal 17 mei 2016)

untuk atau tentang keragaman budaya dalam merespon perubahan demografis dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara komprehensif.

Dalam dunia Islam telah mengenal konsep multikultural pada kekhalifahan Abbasiyah, jauh sebelum Prudence Candall merespon kebutuhan pendidikan berwawasan multikultural. Adalah Khalifah Al Ma'mun yang menjabat sebagai khalifah pada tahun 813-833 M di institusi pendidikan tinggi Bayt Al-Hikmah. Konsep demokrasi dan pluralitas sudah begitu kental dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan pendidikan di institusi ini. Nilai-nilai kebebasan berekspresi, keterbukaan, toleransi dan kesetaraan dapat dijumpai pada proses pengumpulan manuskrip-manuskrip dan penerjemahan buku-buku sains Yunani. Selain itu, Khalifah al-Ma'mun memberikan kebebasan dan kesetaraan kepada sarjana muslim dan non muslim.²² Perbedaan etnik kultural dan agama bukan menjadi halangan dalam penerjemahan berbagai kitab dari Barat. Para penerjemah itu berasal dari berbagai suku bangsa dan agama.

Nilai-nilai Multikulturalisme dalam Islam

Pendidikan multikultural secara psikologis memandang manusia memiliki beberapa dimensi yang harus diakomodir dan dikembangkan secara keseluruhan. Pada dasarnya, manusia adalah pengakuan akan pluralitas, heterogenitas, dan keberagaman manusia itu sendiri. Keberagaman itu berupa ideologi, agama, paradigma, pola pikir, kebutuhan, keinginan dan tingkat intelektualitas.²³ Baik agama Islam atau pun agama-agama di dunia, sebenarnya penuh dengan ajaran-ajaran tentang perdamaian, menghargai orang lain meskipun berbeda agama, kejujuran, keadilan, persamaan hak dan kewajiban, serta lainnya yang merupakan tonggak tegaknya multikultural. Ajaran Islam mengandung nilai-nilai multikulturalisme yang dijabarkan secara ringkas dalam bentuk tabel dibawah ini:

²²Suwito, et. al., *Sejarah Sosial Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 30-31.

²³Ibid., hlm. 26.

Kategori	Nilai Multikulturalisme dalam Islam
Nilai-nilai utama	<i>Tauhid</i> , yaitu meng-Esa-kan Tuhan. Pandangan hidup manusia bertujuan untuk merealisasikan konsep ke-Esa-an Tuhan dalam hubungan antarsesama manusia. Tuhan sebagai sumber utama bagi umat manusia, karenanya sesama manusia adalah bersaudara (<i>ukhuwah basyariyah</i>).
	<i>Ummah</i> , yaitu hidup bersama. Semua orang memiliki akses yang sama untuk tinggal di bumi ini. Bersama-sama saling berdampingan dan mengikat hubungan sosial dalam sebuah kelompok, komunitas, masyarakat, atau bangsa.
	<i>Rahmah</i> , yaitu kasih sayang, yakni perwujudan sifat-sifat Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia yang diciptakan oleh Tuhan untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain atas dasar semangat saling mengasihi dan peduli.
	<i>Al-Musawah</i> , yaitu taqwa (<i>egalite</i>): semua manusia adalah bersaudara dan mendapat perlakuan yang sama di hadapan Allah SWT, meskipun berbeda jenis kelamin, gender, ras, warna kulit, dan agama.
Penerapan	<i>Ta'aruf, ihsan</i> , yaitu saling mengenal dan berbuat baik. Sadar dan ingin untuk tinggal bersama, berdampingan dengan yang berbeda budaya, etnis, dan agama. Agar dicapai wawasan sosial yang luas, saling bekerja sama, saling memberi/menerima, serta rela berkorban.
	<i>Tafahum</i> , yaitu saling memahami. Kesadaran bahwa nilai-nilai mereka dan kita adalah berbeda. Saling melengkapi satu sama lain dan memberikan kontribusi pada hubungan yang dinamis terhadap yang lain.
	<i>Takrim</i> , yaitu saling menghormati merupakan nilai universal yang ada dalam semua agama dan budaya dimana kita dapat mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan pendapat dan pandangan yang berbeda, juga untuk menghormati nama baik dari berbagai individu maupun kelompok.

	<p><i>Fastabiq al-Khairat</i>, yaitu berlomba dalam kebaikan, persamaan dalam perbedaan dapat mendukung terjalannya komunikasi dan kompetisi antar individu dan kelompok untuk memperoleh harga diri dan mutu yang lebih tinggi pada semua aspek kehidupan sosial.</p>
	<p><i>Amanah</i>, yaitu saling mempercayai untuk menjaga sikap saling mempercayai dalam hubungan antarsesama manusia.</p>
	<p><i>Husnuzhan</i>, yaitu berpikir positif agar dapat memiliki sikap berpikir positif.</p>
	<p><i>Tasamuh</i>, yaitu toleransi, berarti menerima kebebasan beragama dan berekspresi serta menghormati perbedaan dan keragaman dalam budaya dan etnis.</p>
	<p><i>'Afw, maghfirah</i>, pemberian/ permohonan ampunan: memberi maaf berarti melupakan semua bentuk penyiksaan, kejahatan, dan perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang baik secara suka atau tidak.</p>
	<p><i>Sulh</i>, yaitu perdamaian atau rekonsiliasi, yakni jalan yang terpilih untuk mengumpulkan konsep kebenaran, ampunan, dan keadilan.</p>
	<p><i>Islah</i>, yaitu resolusi konflik. Perilaku ini menekankan pada kekuatan hubungan antara dimensi psikologis dan kehidupan politik masyarakat melalui kesaksian bahwa penderitaan individu atau kelompok tentu akan tumbuh dengan cepat bila kita tidak memahami, mengampuni, dan menyelesaikan konflik.</p>
Tujuan	<p><i>Silah</i>, yaitu salam atau perdamaian, yakni membangun perdamaian, menjaga perdamaian, atau membuat perdamaian.</p>
	<p><i>Layyin</i>, yakni lemah lembut atau budaya anti kekerasan</p>
	<p><i>'Adl</i> atau keadilan, yaitu keseimbangan sosial yang memuat rasa peduli, saling berbagi, serta sikap moderat dalam merespons perbedaan, jujur, dan terbuka dalam segala sudut pandang atau perbuatan.</p>

Multikulturalisme dalam Pendidikan Islam

Pada dasarnya, multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang menekankan kesederajatan dalam perbedaan-perbedaan kebudayaan. Penekanan penjelasan diatas, mengandung makna bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menekankan kesederajatan dalam perbedaan-perbedaan kebudayaan atau latar belakang siswa atau peserta didik.²⁴ Pendidik dalam konteks sekarang berhadapan dengan tantangan untuk menyiapkan peserta didiknya dalam latar belakang kultur yang berbeda untuk hidup dalam sebuah perubahan kehidupan sosial.²⁵ Oleh karena itu, kurikulum pendidikan multikultural mencakup objek-objek yang bersinggungan dengan keragaman, seperti: toleransi, tema-tema tentang perbedaan etnik-kultural, agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi, dan pluralitas, dan kemanusiaan universal.

Pengajaran pendidikan agama mempunyai fakta yang kurang mengena pada kenyataan yang ada di lapangan. Pada kenyataannya, pendidikan agama menekankan indoktrinasi pada peserta didiknya dengan mengajarkan surga-neraka, pahala-dosa, mukmin-kafir, baik-buruk, dan sebagainya. Pelajaran yang diajarkan kurang mengena pada dimensi nurani, peserta didik hanya menyerap aspek pengetahuan saja dan belum sampai menyentuh aspek moral dan perilaku dalam bersikap dan bertindak.²⁶ Melihat banyaknya konflik-konflik yang bernuansa agama, selayaknya pendidikan agama direvisi dari konsep indoktrinasi menjadi relevansi. Perlunya merevisi pola tersebut dengan pola relevansi, dimana peserta didik tidak hanya diajari sebatas pengetahuan saja, akan tetapi perlunya menyentuh aspek nurani dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa dihayati dan diamalkan.

Isrofil Amar menuliskan empat pokok yang dipandang sebagai dasar multikultural dalam pendidikan Islam, yaitu kesatuan dalam aspek ketuhanan dan pesan-Nya (wahyu), kesatuan kenabian, tidak ada paksaan dalam beragama, dan pengakuan terhadap eksistensi

²⁴ Soewito, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, hlm. 25.

²⁵ Donna M. Gollnick dan Philip C. Chinn, *Multicultural Education in a Pluralistic Society, Sixth Edition* (New Jersey: Merril Prentice Hall, 2002), hlm. 4.

²⁶ Amar, Isrofil. "Studi Normatif Pendidikan Islam Multikultural", *Islamica* (Vol. 4, No.2. Maret 2010), hlm. 323.

agama lain. Semua yang telah dikemukakan tersebut normatif karena merupakan ketetapan Tuhan.²⁷ Pokok-pokok yang telah dikemukakan tersebut, ditinjau secara normatif yang telah tercantum dalam Al Qur'an. Dari aspek kesatuan ketuhanan, pendidikan Islam berpedoman pada Q.S. al-Nisâ' ayat 131²⁸ dan Q.S. Ali Imrân ayat 64.²⁹ Dari aspek kesatuan pesan ketuhanan (wahyu) dapat dilihat dalam Q.S. Al-Nisâ' ayat 163.³⁰ Dari aspek kesatuan kenabian, Al Faruqi mendasarkan pandangannya dari Q.S. al-Anbiyâ' ayat 73³¹ dan Q.S. Ali Imrân ayat 84.³² Pandangan Islam yang terkait dengan kebebasan menganut agama berdasar pada Q.S. al-Baqarah ayat 256.³³ Sedangkan

²⁷Ibid., hlm. 326.

²⁸Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan (juga) kepada kamu; bertakwalah kepada Allah. Tetapi jika kamu kafir, maka ketahuilah sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi hanyalah kepunyaan Allah dan Allah maha Kaya dan Maha Terpuji.

²⁹Katakanlah: Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim.

³⁰Sesungguhnya, Kami mewahyukan kepadamu (Muhammad) sebagaimana Kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan Kami telah mewahyukan (pula) kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya; Isa, Ayyub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan Kami telah memberikan Kitab Zabur kepada Daud.

³¹Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami, dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah.

³²Katakanlah (Muhammad), "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa, dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami berserah diri."

³³Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut (setan dan apa saja yang disembah kecuali Allah) dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

pengakuan akan eksistensi agama-agama lain termaktub dalam Q.S. al-Mâidah ayat 69.³⁴

Pengajaran pendidikan agama harus mengajarkan pengetahuan konseptual menjadi pengetahuan yang fungsional-konseptual. Dengan kata lain, pengetahuan agama menjadi pedoman orang untuk menanggapi, menilai dan menentukan sikap hidup.³⁵ Seyogyanya, pengajaran agama sebagai salah satu bagian dari pendidikan agama seharusnya bertitik tolak dari dan dikaitkan dengan kehidupan nyata sehari-hari, misalnya bagaimana berpikir dan bertindak untuk diri sendiri dan orang lain, berhubungan dengan orang lain, bermasyarakat, toleransi, hidup dalam masyarakat plural, dan sebagainya. Selain itu, penghayatan dan kenyataan pendidikan agama yang ada, juga dipertimbangkan mengingat pemikiran kritis peserta didik yang tidak hanya menunggu relevansi indoktrinasi pengajaran agama di akhirat, tetapi juga di alam nyata.

Pemeluk agama seharusnya memahami makna dan mewujudkan kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Sudah banyak contoh gigih dalam membela dan memperjuangkan tegaknya kemerdekaan atau kebebasan seperti yang dilakukan oleh para pejuang dalam mengusir penjajah dan menjaga keutuhan bangsa dari sabang sampai marauke dengan semboyan pancasila berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang secara substansi adalah tak ada perbedaan serta menghargai satu dengan yang lainnya. Agama dan pendidikan merupakan pintuk gerbang yang besar dan kokoh bagi civil society dan Multikulturalisme bagi masyarakat Indonesia yang harus dipimpin oleh semua kalangan terutama tokoh agama dan pendidikan. Agar tidak gagal dalam memperjuangkan penegakan persamaan derajat dan persaudaraan.

Penutup

Masyarakat madani mengandung makna masyarakat yang menjadikan nilai-nilai peradaban sebagai ciri utama. Di Indonesia,

³⁴ Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa yang beriman kepada Allah, pada Hari Kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak bersedih hati.

³⁵ Bashori Muchsin et.al., *Pendidikan Islam Humanistik* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 90.

istilah masyarakat madani secara substantial menuju pada perlunya penguatan masyarakat (warga) dalam sebuah komunitas negara untuk mengimbangi dan mampu mengontrol kebijakan negara yang cenderung memposisikan warga negara di posisi yang lebih lemah. Beberapa karakteristik yang melandasi masyarakat madani, yaitu: *free public sphere*, demokratis, toleran, pluralisme, dan keadilan sosial. Tujuan pendidikan nasional harus menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai wawasan dan perilaku yang beradab.

Konsep *Civil Society* diprioritaskan dalam perspektif pendidikan yang juga menjadi tujuan pendidikan nasional. Konsep dasar pembaharuan pendidikan harus didasarkan pada asumsi-asumsi dasar tentang manusia menurut ajaran Islam, filsafat dan teori pendidikan Islam yang dijabarkan dan dikembangkan berdasarkan asumsi-asumsi tentang manusia dan lingkungannya. Atau dengan kata lain pembaharuan pendidikan Islam adalah filsafat dan teori pendidikan Islam yang sesuai dengan ajaran Islam, dan untuk lingkungan (sosial-kultural) yang dalam hal ini adalah masyarakat madani. Konsep dasar pendidikan Islam supaya relevan dengan kepentingan umat Islam dan relevan dengan disain masyarakat madani. Maka penerapan konsep dasar filsafat dan teori pendidikan harus memperhatikan konteks supra sistem bagi kepentingan komunitas "masyarakat madani" yang dicita-citakan bangsa ini.

Melihat banyaknya konflik yang bernuansa agama, selayaknya pendidikan agama direvisi dari konsep indoktrinasi menjadi relevansi. Perlunya merevisi pola tersebut dengan pola relevansi, dimana peserta didik tidak hanya diajari sebatas pengetahuan saja, akan tetapi perlunya menyentuh aspek nurani dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa dihayati dan diamalkan. Nilai-nilai multikulturalisme telah tercantum dalam al-Qur'an. *Wa Allâh a'lam bi al-Shawâb.**

Daftar Pustaka

- Amar, Isrofil. "Studi Normatif Pendidikan Islam Multikultural", *Islamica* Vol. 4, No.2. Maret 2010.
- Assegaf, Abd. Rahman. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Grafindo, 2011.

- Assegaf, Abd. Rahman. *Studi Islam Kontekstual: Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah*. Yogyakarta: Gama Media, 2005.
- Azis, Rosmiaty. "Reaktualisasi Pendidikan Islam Dalam Era Postmodernisme Tantangan Menuju *Civil Society* di Indonesia". Tesis, IAIN Alaudin Makassar, 2003.
- Gollnick, Donna M. dan Philip C. Chinn, *Multicultural Education in a Pluralistic Society, Sixth Edition*. New Jersey: Merrill Prentice Hall, 2002.
- Hilmy, Masdar. "Menggagas Paradigma Pendidikan Berbasis Multikultural", *Ulumuna*, Vol. VII No.12. Juli-Desember 2003.
- Idi, Abdullah dan Toto Suharto. *Revitalisasi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Mahfud, Choirul. *Pendidikan Multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Muchsin, Bashori, Moh Sulthon, dan Abdul Wahid. *Pendidikan Islam Humanistik*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Najib, Agus Moh. et.al. *Multikulturalisme Dalam Pendidikan Islam (Studi Terhadap UIN Yogyakarta, IAIN Banjarmasin, Dan STAIN Surakarta)*. Surakarta: STAIN Surakarta, 2008.
- Rosyada, Dede. et.al. *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Sanaky, Hujair A.H. "Pembaharuan Pendidikan Islam Menuju Masyarakat Madani (Tinjauan Filosofis)" dalam *Jurnal Mukaddimah*. Yogyakarta: Kopertais III, 1999.
- Soewito, et.al. *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Tibi, Bassam. *Islam and Cultural accommodation Of social Change*. San Fransisco: Westview Press, 1991.
- <http://pbidsuccess.blogspot.co.id/2014/02/multikulturalisme-pendidikan-agama.html>